

## DAFTAR PUSTAKA :

- A. Achmadi dan C. Narbuko.( 2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Anggraeni dan Kiswaran.(2011). *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Semarang : Skripsi.Universitas Diponegoro
- Christensen, Larry. (2006). *Experimental Methodology*. Boston : Allyn & Bacon
- Danim, Sudarwan. (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Djamal, I dan Abimanyu, U. (1993). (Pengaruh Pemanfaatan Gedung Tinggi terhadap Dampak Lalu Lintas”. Bahan Seminar Dampak Pemanfaatan Intensitas lahan gedung tinggi/Superblok di Jakarta terhadap Lalu Lintas di Sekitarnya, Universitas Taruma Negara bekerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta
- Firmansyah. (2003). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Sebagai Suatu Lingkup Kebijakan Publik*. Makalah pada Seminar dan Kongres Nasional II Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Bogor : Program Studi Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pakuan
- Lembaga Administrasi Negara. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

- Lunenburg. (2012). *Compliance Theory and Organizational Efektiveness. International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity* Vol. 14, No. 1.
- Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita : Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Patton, C.V. & Sawicki, D.S. (1993), *Basic methods of policy analysis and planning*, New Jersey: Prentice Hall
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyan Ratih. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Putra, Fadillah. (2003). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Pyblik : Perubahan dari inovasi kebijakan publik dan ruag partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik : yogyakarta : pustaka pelajar*
- Ridwan, HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara : Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (2006) . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Stainback, Susan and William. (1998). *Understanding and Conducting Qualitative Research*. Iowa : Kendall Publishing Company
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: PT Alfabeta
- Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik* . Jakarta: Sinar Grafika

Swasta, Basu dan Handoko, Hani .( 2010). *Manajemen Pemasaran: Analisa dan Perilaku Konsumen*. Yogyakarta : BPFE

Weaver, R.K. (1990), Target compliance: The final frontier of policy implementation, *Issues in Governance Studies*, 27.

Widodo. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. (2013). Kebijakan Publik : teori Proses dan Studi Kasus. Jakarta : CAPS

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

Keputusan Menteri Parpostel no KM 94/HK103/MPPT 1997

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2014). Kajian Dampak Pertumbuhan Perhotelan Terhadap Iklim Investasi di kota Yogyakarta

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.jogjakota.bps.go.id](http://www.jogjakota.bps.go.id)

Kresna. (2016). *Risiko dan Nasib Buruk Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta* .Tirto.id, 17 Juni 2016. Diakses melalui <https://tirto.id/20160617-39/risiko-dan-nasib-buruk-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-242909>

Hasanudin, Ujang. (2016). *Hotel Jogja Langgar Amdal Lalin Sanksi Jadi Wewenang Dinas Penertiban*. Harian Jogja. 3 Mei 2016. Diakses melalui [http://m.harianjogja.com/baca/2016/05/03/hotel-jogja-hotel-langgar-amdal-lalin-sanksi-jadi-wewenang-dinas-penertiban-716029?mobile\\_switch=mobile](http://m.harianjogja.com/baca/2016/05/03/hotel-jogja-hotel-langgar-amdal-lalin-sanksi-jadi-wewenang-dinas-penertiban-716029?mobile_switch=mobile)

Rfk. (2016). *Tak Punya Izin, 14 Hotel di Yogyakarta Nekat Beroperasi*.  
Tribunnews. 27 Mei 2016. Diakses melalui  
<http://jogja.tribunnews.com/2016/03/27/tak-punya-izin-14-hotel-di-yogyakarta-nekat-beroperasi>